

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk membandingkan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Melalui kajian terdahulu, peneliti dapat menempatkan penelitian mereka dalam konteks yang tepat dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Dalam bagian ini, peneliti mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mereka dan membuat ringkasan dari hasil penelitian tersebut, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis.

1. **Judul Penelitian:** Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra (Fara Dhania Aulia, Nurliana Cipta Apsari).

Pengembangan aktivitas kehidupan sehari-hari yang mandiri bagi penyandang disabilitas penglihatan sangat penting karena aktivitas ini berfungsi sebagai pelatihan kerja, perawatan pribadi, kompetensi interpersonal, dan keterampilan bertahan hidup di masyarakat. Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Pekerja sosial mempunyai kewajiban profesional untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu penyandang disabilitas dengan menawarkan

layanan dan solusi..

Persamaan:

Penelitian ini melibatkan partisipan yang memiliki disabilitas penglihatan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penggunaan metode observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Perbedaan:

Penelitian sebelumnya ini fokus pada Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Disabilitas Netra sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika pelayanan sosial dalam meningkatkan kemandirian disabilitas netra.

2. **Judul Penelitian:** Pengaruh Pelatihan Orientasi Dan Mobilitas Terhadap Kemandirian Disabilitas Netra Di Yayasan Raudlatul Makfufin Tangerang Selatan (Elis K).

Pengaruh yang signifikan pelatihan orientasi dan mobilitas terhadap kemandirian disabilitas netra di Yayasan Raudlatul Makfufin.

Persamaan:

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki disabilitas penglihatan, dan penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Perbedaan:

Penelitian sebelumnya ini fokus pada pelatihan orientas dan mobilitas dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra, sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika pelayanan sosial dalam meningkatkan kemandirian disabilitas netra

3. **Judul Penelitian:** Peran Pembimbing Keagamaan Dalam Mengembangkan Kemandirian Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo Kudus. (Diana Dama Yanti)

Peran Pembimbing Keagamaan dalam Mengembangkan Kemandirian Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di PPSDSN Pendowo Kudus terbukti bahwa pembimbing disabilitas sensorik netra mempunyai tiga peran yaitu: 1) Peran pendidik, 2) Peran Pembimbing, 3) Peran motivator.

Persamaan:

Peserta penelitian ini adalah individu yang mengalami disabilitas penglihatan, dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada deskripsi. Data dalam penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen.

Perbedaan:

Penelitian sebelumnya ini fokus pada Peran pembimbing agama Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika pelayanan sosial dalam meningkatkan kemandirian disabilitas netra.

B. Konsep Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” berdasarkan kamus Bahasa Inggris - Indonesia yang dikarang oleh (M.Echols & Shadily, 1989) Problematika adalah istilah yang mengacu pada isu atau masalah. Berasal dari kata “problem” yang berarti suatu kesulitan atau tantangan yang perlu dipecahkan. Masalah sendiri merupakan hambatan atau tantangan yang harus diselesaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan "problematika" sebagai persoalan yang masih menimbulkan masalah atau tantangan yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, problematika mengacu pada hambatan atau tantangan yang belum terselesaikan, menghambat pencapaian suatu tujuan secara maksimal (Pustaka & Depdiknas, 2005).

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

C. Konsep Pelayanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial kini lebih menekankan pada pendidikan, peningkatan keterampilan, dan menurunkan hambatan terhadap fungsi pribadi untuk meningkatkan situasi kehidupan masyarakat dibandingkan pada kesejahteraan anak dan keluarga, rehabilitasi masyarakat miskin, masa

percobaan, dan inisiatif klise. Oleh karena itu, inisiatif kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan perumahan saat ini dimasukkan dalam layanan sosial. Menurut Huraerah (2011:45) dalam Keifer GEffenberger (1967), pelayanan sosial didefinisikan sebagai berikut:

“Pelayanan sosial merupakan kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada warga negara yang mengalami masalah karena keluarga mereka tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini meliputi pelayanan sosial untuk anak-anak (termasuk balita dan remaja) serta orang lanjut usia yang terlantar atau mengalami kecacatan.”

Pengertian dari pelayanan sosial sulit untuk dijelaskan secara sederhana dan berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, di Inggris istilah tersebut merujuk pada layanan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara langsung. Menurut Romanyshyn (1971) yang dikutip oleh Fahrudin (2014:51) dalam artikel jurnal (Az- Zahrah, n.d.) pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai:

“Pelayanan sosial adalah upaya untuk membantu individu dan keluarga dalam memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui dukungan sumber daya sosial dan proses peningkatan kemampuan mereka dalam mengatasi tekanan dan tuntutan kehidupan sosial yang normal. Definisi ini mengacu pada upaya untuk membantu individu dan keluarga dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.”

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pemberian pelayanan adalah untuk memelihara dan meningkatkan keberfungsian sosial seseorang agar kembali normal dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan sumber

dukungan yang memadai. Jadi, untuk membantu mereka yang sedang mengalami permasalahan sosial, diperlukan bakti sosial seperti ini di samping modernitas saat ini.

2. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial bertujuan dapat membantu, mengubah, atau memperbaiki aktivitas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab keluarga, lingkungan, dan kerabat, seperti pendidikan, perawatan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial. Pentingnya layanan sosial terlihat dari kemajuan pesat dalam penyampaiannya, beragamnya alasan penyedia layanan memberikan layanan tersebut, meningkatnya jumlah kasus dan keterlibatan anggota staf, dan faktor-faktor lainnya. Pelayanan sosial biasanya diarahkan pada kelompok masyarakat kurang terlayani yang membutuhkan perhatian dan keamanan ekstra. Fahrudin (2012:54) menguraikan tujuan bakti sosial dalam tesisnya (Maulani, 2016):

- a. layanan yang dirancang untuk mempercepat proses sosialisasi dan pembangunan komunitas
- b. Layanan seperti perlindungan sosial dan perawatan pengganti dimaksudkan untuk menawarkan pengobatan, bantuan, dan rehabilitasi.
- c. layanan yang berupaya memberikan akses, pengetahuan, dan arahan kepada masyarakat.

Tujuan dari pelayanan sosial adalah untuk membantu orang, komunitas, atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan mereka dan memperoleh serta memelihara keselamatan. Dan tujuan lain dari pelayanan sosial juga

mencakup memberikan akses, informasi, dan nasihat yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kondisi kehidupan, baik melalui kerjasama ataupun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Pelayanan sosial sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu untuk sosialisasi dan pengembangan, terapi, pertolongan, rehabilitasi, perlindungan sosial, dan perawatan pengganti.

D. Konsep Layanan Manusia

Berbagai sarjana menawarkan banyak definisi pelayanan manusia, tetapi tidak ada yang diterima secara universal (Schmolling & Youkeles, 1997). Definisi berbeda yang diajukan oleh para sarjana dan praktisi digunakan untuk tujuan yang berbeda, mengklasifikasikan materi bibliografi, mencirikan organisasi, dan menentukan keunikan profesional personel. Selain itu, definisi tersebut menekankan berbagai aspek konsep, termasuk penyedia, penerima, kebutuhanyang dimaksudkan untuk dipenuhi oleh layanan, dan kerangka kerja organisasi. Terlepas dari konteks, tujuan dan perspektif yang berbeda, semua definisi berikut mengacu pada istilah umum yang sama, yaitu "layanan manusia" (Lendriyono, 2022).

1. Unsur-unsur Layanan Manusia

1. Penyedia (Provider)

Faktor manusia dalam penyampaian layanan tampaknya lebih dari sudut pandang semantik. "Layanan kepada masyarakat" menekankan faktor manusia, seperti halnya "layanan kesehatan" dan "layanan

informasi" menyiratkan bahwa kesehatan dan informasi merupakan faktor dalam penyediaan layanan ini Eriksen (1997) menyajikan perspektif ini: "Secara umum, pelayanan manusia terjadi setiap kali satu orang dipekerjakan untuk melayani orang lain."

2. Penerima (The Recipient)

Hasenfeld & English (1983) mengalihkan fokus dari penyedia layanan dan aktivitas mereka ke penerima layanan. Mereka mengakui karakteristik manusia penerima dan mendefinisikan Organisasi Layanan Manusia sebagai organisasi "yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi, melestarikan, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu dengan mendefinisikan, memodifikasi atau mengubah karakteristik pribadi mereka". Oleh karena itu, organisasi SDM memiliki dua karakteristik utama. Pertama, mereka bekerja secara langsung dengan dan dengan orang-orang. Kedua, "mereka diberdayakan, dan dengan demikian membenarkan keberadaan mereka, untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pelayan mereka (Hasenfeld & English, 1983).

3. Kebutuhan (The Needs)

Banyak definisi menekankan sentralitas kebutuhan sebagai ciri utama pelayanan manusia. Seperti yang didefinisikan oleh Library of Congress, "layanan manusia" mengacu pada "berbagai kebijakan, program, layanan, dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan." Scheurel (1987) mengambil pendekatan yang

lebih luas dan mencirikan layanan manusia sebagai layanan sosial yang tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan sosialisasi atau untuk memecahkan masalah individu dan kelompok. Area yang dicakup oleh layanan manusia meliputi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perumahan, mengamankan mata pencaharian, informasi. dan nasihat, hukum, rekreasi, keterampilan dan agama.

4. Kerangka Organisasi (The organizational Framework)

Beberapa peneliti menekankan peran kunci dari kerangka organisasi penyampaian layanan (Hasenfeld & English, 1983, Hasenfeld, 1983, 1992, O'Looney, 1996, Schmolling et al., 1997). Schmolling dkk. (1997) mengecualikan bantuan keluarga, teman, atau dukungan utama lainnya dan menerapkan konsep "pelayanan manusia" hanya untuk organisasi formal. O'looney (1996) menekankan sifat sistemik penyampaian layanan.

E. Konsep Kemandirian

1. Pengertian Kemandirian

Menurut Kartono (2000), konsep kemandirian berasal dari kata "Autonomy" yang merujuk pada kemampuan individu untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan demi memuaskan keinginannya sendiri sebagai manusia dewasa. Menurut Reber, kemandirian juga dapat diartikan sebagai sikap otonom, di mana seseorang relatif bebas dari pengaruh penilaian, pandangan, dan keyakinan orang lain

(NINGRUM, 2016).

2. Kemandirian Disabilitas Netra

Kemandirian pada penyandang disabilitas diartikan sebagai mampu menghadapi kondisi yang mana kondisi tersebut bisa menjadikan disabilitas untuk hidup mandiri demi mencapai masa depan yang lebih baik. Lewat kemandirian, Penyandang disabilitas bisa memilih arah hidupnya untuk menjadi berkualitas (Eny,2015). Tidak hanya ada pada diri individu yang normal, tetapi juga terdapat dalam diri individu yang mengalami keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas.

Kemandirian yang di alami penyandang disabilitas akan terealisasi ketika mereka sanggup menghadapi kondisi yang membuat mereka mandiri baik itu dalam bersikap dan mengambil keputusan (Muharany, 2020). Kemandirian disini adalah kemampuan keseharian hingga mereka tidak tergantung lagi, dikenal dengan ADL (Activity of Daily Living). Kegiatan tersebut diantaranya kegiatan rutinitas yang harus dikuasai oleh manusia. (Sudrajat & Rosida, 2013) Menurut (Laurence, 2001) Kemandirian diartikan sebagai menentukan keputusan sesuai kehendak sendiri. Sedangkan menurut (Rahman & Adhama, 2019) kemampuan menuju individu yang mampu berdiri sendiri. (Arika Widiana, 2010) memaparkan bahwasannya kemandirian adalah salah satu karakteristik yang dimiliki masing - masing manusia dan menunjukkan skill yang dimilikinya.

Kemandirian juga bisa dilihat dari bagaimana individu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan (Eny,2015).

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipetik inti bahwasannya orang disebut mandiri ketika bisa bertindak tanpa orang lain. (Rizky, 2015). Sehingga kemandirian yang dimaksud dalam penulisan literature review ini adalah suatu kondisi disabilitas yang mampu dan percaya diri dalam mencapai kehidupan yang mandiri tanpa bergantung pada orang lain.(Geminastiti, 2018)

F. Konsep Disabilitas Netra

1. Konsep Disabilitas

Disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris disabilitas yang secara etimologis terbentuk dari kata dis- (tidak) dan ability- (kemampuan). Oleh karena itu, pengertian disabilitas pada hakikatnya adalah ketidakmampuan dalam melakukan suatu tugas. Namun sebelum istilah “disabilitas” digunakan, orang hanya menyebutnya “disabilitas”. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan peraturan perundangan yang bertujuan untuk modernisasi undang-undang tentang penyandang disabilitas, yang mencakup pemahaman terhadap penyandang disabilitas. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan sebagai berikut:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dalam konteks ini, keterbatasan berkaitan dengan situasi di mana

tubuh, emosi, atau kemampuan mental seseorang tidak berfungsi, sehingga menyulitkan atau menghambat pelaksanaan tugas tertentu. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menjunjung tinggi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menjadi bukti lebih lanjut atas klaim ini. penyandang disabilitas dalam pengertian ini berhubungan dengan orang-orang yang berarti: “termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”. Keterlibatan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat umum tercakup dalam partisipasi yang dimaksud. Berdasarkan definisi ini, penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi keterbatasan dalam fungsi organ tubuh, aspek emosional, atau kemampuan kognitif, yang menghambat mereka dalam berpartisipasi secara sosial. (Widianarsih, 2019).

a. Kualifikasi Penyandang Disabilitas

Pengertian dan kategori penyandang disabilitas dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan : Bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan penyandang disabilitas baik mental, fisik, atau gabungan keduanya

telah berkembang menjadi lima kategori berbeda: disabilitas ganda, intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Berikut penjelasan penggolongan penyandang disabilitas:

1) Penyandang Disabilitas Fisik

Merupakan gangguan dalam kemampuan bergerak, termasuk kondisi seperti amputasi, kelumpuhan, kelumpuhan serebral (CP), hasil dari stroke, efek dari kusta, dan pertumbuhan tubuh yang terhambat.

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Terdapat gangguan dalam fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk lambat belajar, disabilitas intelektual, dan downsyndrome.

3) Penyandang Disabilitas mental

Terdapat gangguan dalam fungsi kognitif, emosional, dan perilaku, yang meliputi:

- a) Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; dan
- b) Gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan gangguan hiperaktivitas.

4) Penyandang Disabilitas sensorik

Terjadi gangguan dalam salah satu fungsi dari panca indera, termasuk disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran,

dan/atau disabilitas bicara.

2. Konsep Tuna Netra

Anak-anak penyandang disabilitas sensorik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti:

- a. Anak yang memiliki kelainan pada mata.
- b. Anak yang mengalami gangguan pendengaran.
- c. Anak yang mengalami gangguan pada organ bicara.
- d. Anak yang mengalami cacat pada organ gerak.

Anak tunanetra, kadang-kadang disebut kebutaan, adalah mereka yang tidak dapat menggunakan penglihatannya secara normal karena keterbatasan penglihatan dalam proses belajar meskipun telah dibantu dengan alat bantu penglihatan atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali dan memerlukan tahapan khusus untuk melakukan proses belajar. Kondisi anak dengan gangguan penglihatan ini memiliki beberapa ciri khusus, seperti:

- a. Kemampuan penglihatannya di bawah rata-rata dibandingkan dengan individu yang memiliki penglihatan normal.
- b. Lensa mata mengalami kekeruhan atau ada ketidaknormalan pada cairan mata.
- c. Kendali posisi mata sulit diatur oleh sistem saraf otak.
- d. Terdapat kerusakan pada sistem saraf otak yang terkait dengan fungsi penglihatan.

Cara mendeteksi kecacatan penglihatan, Snellen Chart digunakan

sebagai alat tes. Seorang anak dianggap sebagai tunanetra jika tingkat ketajaman penglihatannya (visus) kurang dari 6/21. Dengan kata lain, berdasarkan hasil tes, seorang anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang biasanya dapat dibaca oleh orang dengan penglihatan normal pada jarak 21 meter. Anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berikut:

- a. Kondisi buta, terjadi ketika seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan cahaya eksternal sama sekali, sehingga tingkat penglihatannya mencapai 0.
- b. Kondisi Low Vision, terjadi ketika seorang anak masih dapat menerima rangsangan cahaya eksternal, tetapi tingkat ketajamannya lebih dari 6/21, atau ketika seorang anak hanya mampu membaca judul berita pada surat kabar.

3. Klasifikasi Tuna Netra

Derajat keparahan ketunanetraan dapat berkisar dalam skala yang bervariasi, mulai dari tingkat yang ringan hingga yang sangat berat. Tingkat keparahan ketunanetraan didasarkan pada kemampuan individu untuk melihat bayangan benda. Lebih lanjut, bayangan benda ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berikut:

- a) Anak dengan gangguan penglihatan yang dapat diperbaiki melalui pengobatan atau alat optik tertentu.
- b) Anak dengan gangguan penglihatan, yang meskipun telah diatasi dengan pengobatan atau alat optik khusus, masih menghadapi

kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah reguler, sehingga memerlukan metode pengajaran yang disesuaikan untuk mengatasi kekurangannya.

- c) Anak dengan gangguan penglihatan yang tidak dapat diperbaiki dengan pengobatan atau alat optik apa pun karena mereka sudah tidak lagi dapat menggunakan indera penglihatannya.

